



Media: BERNAS

Hari: Rabu

Tanggal: 14 Juni 2017

Halaman: 1

**Penataan Sasiun Tugu  
Pedagang Merasa  
Diintimidasi**

JOGJA, BERNAS -- Proses penataan kawasan sisi selatan stasiun Tugu Jogja menuai hambatan. Para pedagang setempat tak terima karena PT KAI Daop 6 mengeluarkan surat peringatan (SP) II untuk pengosongan pedagang di areal tersebut. Pedagang merasa dilintimadi karena SP II itu melalui pihak ketiga.

Para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Manunggal Karsa tersebut mengaku telah menerima SP II dari PT KAI Daop 6 Yogyakarta catat di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperind) Kota Yogyakarta.

"Kami bukan pedagang illegal. Kami tercatat sebagai pedagang dibawah Disperindag. Kami juga masih membayar retribusi," kata Rudi Tri Purnama, Ketua Paguyuban Manunggal Karsa, Selasa (13/6).

Menurut Rudi harusnya PT KAI berkoordinasi dengan Disperindag Kota Yogyakarta, bukan secara langsung menyurati para pedagang. Rudi mengaku menerima surat SP II dari PT KAI Daop 6 Yogyakarta melalui pihak ketiga. Hal itu dinilainya sebagai bentuk intimidasi ke pedagang.

"Harusnya koordinasi dengan

► ke hal 7

## Pedagang Merasa

Sambungan dari hal 1

Disperindag dulu, bukan langsung ke pedagang," tuturnya.

Rudi mengungkapkan, selama ini PT KAI selalu mengatasnamakan warga RW 03 Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta, yang menginginkan penataan PKL di wilayahnya. Warga di sana diimung-imungi menjadi kampung binaan PT KAI.

"Padahal saya ini juga warga RW 03. Aslinya di dalamnya jauh lebih kumuh, malah adaplus-plus," ujarnya.

Menurut Rudi, sekitar 80 pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Manunggal Karsa tersebut selama ini mengantongi Kartu Bukti Pedagang (KBP) yang dikeluarkan Dinas Pengelolaan Pasar, yang sekarang menjadi Dinas Perindag. Ia juga mengaku bersama anggota paguyubannya telah mengadukan persoalan tersebut kepada DPRD Kota Yogyakarta.

Saat dikotfirmasi, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri, membenarkan adanya keluhan dari warga di sisi selatan stasiun Tugu Yogyakarta. Nasrul menilai SP II yang dilayangkan PT KAI kepada pedagang tersebut ngawur karena salah alamat.

"Itu ngawur. Salah alamat. Seharusnya dijuzukan

ke Disperindag Kota Yogyakarta. Karena pedagang ini resmi di bawah Disperindag Kota Yogyakarta, harusnya suratnya kesana," katanya.

Nasrul juga mengungkapkan terkait alas hak yang merupakan Sultan Ground yang diklaim oleh PT KAI Daop 6 Yogyakarta, juga perlu ditelusuri. "Perlu dicek dulu. KAI mengklaim dapat kekacangan, padahal sebelumnya dimanfaatkan Pemkot dan diberikan hak kepada pedagang," kata politisi PKS itu.

Penegasan serupa juga disampaikan Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko. Menurut dia Pemkot Yogyakarta harusnya bertanggung jawab melindungi pedagang resmi saat ada persoalan, seperti dengan PT KAI ini. Ia mengaku, tahun lalu sebenarnya DPRD Kota Yogyakarta sudah pernah memfasilitasi pertemuan pedagang dengan PT KAI Daop 6 maupun dengan Pemkot. Tapi, setelah pertemuan tersebut tidak diketahui kelanjutannya.

"Setelah itu kami belum pernah diajak berembus kembali hingga keluarnya SP 1 dari PT KAI," katanya.

Politisi PDIP itu mendesak akan mengambil keputusan tegas dengan menyurati PT KAI supaya tidak mengeluarkan surat peringatan lagi sebelum

ada pertemuan lagi dengan eksekutif dan legislatif. "Kami akan langsung buat suratnya," ujarnya.

Sebelumnya, Manager Humas PT KAI Daop 6 Jogja, Eko Budianto, mengungkapkan keberadaan pedagang di sisi selatan stasiun Tugu Jogja sudah dikoordinasikan dengan Pemkot. Meski demikian Eko belum memberikan keterangan terkait nilai tali asih ataupun besaran kompensasi ganti rugi kepada para pedagang.

Eko hanya menjelaskan saat ini PT KAI Daop 6 Yogyakarta sedang menyelesaikan pembangunan jalur pedestrian di selatan pintu keluar Stasiun Tugu Jogja, yang akan dijadikan percontohan pembangunan jalur pedestrian di sana. Jalur pedestrian yang dibuat sebar enam meter dan trotoar dibuat di dalam pagar, supaya tidak dimanfaatkan pedagang lagi. Diharapkan pada lebaran 2017 sudah selesai. (age)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005